eJournal Administrasi Publik, 8 (1): 2020 : 8747-8760
ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2020

PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI ANGKA KELAHIRAN

Hariani[1] M.Z. Arifin[2], Hj. Hariati[3]

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Melalui Angka Kelahiran dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Melalui Angka Kelahiran.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik Purposive sampling diperoleh melalui key informan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta informan adalah Sekretaris BKKBN, Kepala Sub bagian Perencanaan, Kepala sub bagian Kesehatan Reproduksi Remaja, Kepala Bidang Informasi dan Pengolahan Data, Kepala sub Bagian Umum, Kepala bidang Penggerak Keluarga dan Masyarakat, Kepala Bidang Pembinaan Institusi, Kepala Bidang Keluarga Berencana Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kulalitatif menurut Milles, Huberman dan Saldana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dalam membantu pemerintah mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk Samarinda Pada sisi perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk yang telah berjalan dengan baik. Dari sisi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk yang masih kurang optimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaan kurangnya tenaga PLKB/PKB yang berikaitan dengan kegiatan penyuluhan. Kemudian dari sisi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk belum yang terlaksana dengan karena tidak menggunakan NSKP terbaru. Untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis dibidang pengendalian penduduk sudah cukup baik dalam hal pembimbingan Pembina penyuluh lapangan. Pengahambat yang dialami kurangnya Penyuluh Lapangan (PKB) sehingga menyebabkan daya jangkau petugas lapangan tidak maksimal,

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[2] Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
[3] Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

banyaknya KUPTB yang beralih dari fungsional menjadi structural, kurangnya SOP, Petunjuk Teknis (Juknis) dll sebagai pedoman pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda pada saat ingin melakukan kegiatan serta belum memiliki gedung sendiri.

Kata Kunci : Pertumbuhan Penduduk, Pengendalian Penduduk, Angka Kelahiran

Pendahuluan

Disini peneliti fokus pada salah satu faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat yaitu berdasarkan angka kelahiran. Besar kecilnya angka kelahiran (natalitas) dipengaruhi oleh faktor pendorong kelahiran. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor pendorong kelahiran (*pronatalitas*)

1. Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki.
2. Sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan.
3. Pernikahan usia dini (usia muda).
4. Adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih tinggi nilainya, jika dibandingkan dengan anak perempuan, sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak laki-laki akan berusaha untuk mempunyai anak laki-laki.
5. Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak akan berupaya bagaimana supaya memiliki anak.

Adapun tabel berikut tabel yang menunjukkan jumlah angka kelahiran selama tahun 2015 sampai dengan 2016:

Tabel 1
Angka Kelahiran Perbulan dalam jangka 2 Tahun

Bulan	**Tahun**	
	2015	**2016**
Januari	1,184	1,219
Februari	1,326	1,465
Maret	1,643	1,892
April	1,634	1,945
Mei	1,299	1,338
Juni	1,636	1,785
Juli	1,269	1,307
Agustus	1,589	1,636

Bersambung…

Lanjutan Tabel 1 Angka Kelahiran Perbulan dalam jangka 2 Tahun

1	2	3
September	1,918	1,995
Oktober	1,784	1,837
November	1,862	1,917
Desember	1,680	1,730
Jumlah	18,824	20,066

Sumber: Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda

Dari tabel angka kelahiran diatas setiap bulannya, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan angka kelahiran di Kota Samarinda dengan total yang ada penigkatan terjadi sampai 3% dari total jumlah penduduk. Faktor utama dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah karena tidak ada komitmen pemerintah untuk membatasi pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini Pemerintah seharusnya tanggap dan konsisten pada program yang dicanangkan melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Kurangnya penggunaan alat kontrasepsi yang menurun akan menghasilkan tingkat angka kelahiran semakin tinggi serta minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait menjadikan penyebab masalah ini terus berlanjut dan kian tidak terkendali. Banyak dari masyarakat yang masih tidak mengerti dampak dari laju pertumbuhan penduduk dan masih merasa takut akan efek yang ada pada alat kontrasepsi yang diberikan pemerintah.

Rumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latarbelakang masalah penulis merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Samarinda dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui angka kelahiran penduduk?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Samarinda dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui angka kelahiran?

Pengertian Peran

Peran secara etimologis diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pada umumnya peran tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi tampak suatu dipahami oleh para anggota organisasi. Baik ditetapkan secara formal maupun informal sistem peran merupakan bagian integral dari setiap organisasi. (Kamus besar bahasa Indonesia,2005:854). Peran selalu dimiliki oleh setiap orang namun tergantung pada kedudukan seseorang tersebut dalam masyarakat.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan organisasi. Posisi dalam organisasi merupakan unsur statis yang

menunjukan tempat individu dalam organisasi. Peran lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai aspek proses jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam organisasi serta menjalankan suatu peran, Gibson dan ivancevich dan Donelly (2011:279). Peran termasuk penyesuaian diri dan pelaksanaan fungi seseorang dalam menduduki suatu jabatan pada organisasi.

Pengertian Organisasi

Definisi organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang biasa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan lain, tata aturan ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama didalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. Max Weber (Thoha, 2006:106). Aturan sengaja dibuat dalam organisasi untuk menjadikan organisasi lebih tertata dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta mempu mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Malayu (2008:24). Pada dasarnya orang tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagian makhluk sosial, karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasa manusia berkumpul dan membentuk kelompok yang disebut dengan organisasi.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Ealau dan Prewit (Edi Suharto, 2012:7). Kebijakan merupakan suatu keputusan yang tetap dan harus diataati. Keputusan yang dibuat nyata dan harus diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan masa berlakunya. Kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan dan maksud besar tertentu. Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan beroriaentasi kepada tindakan. Titmus (Edi Suharto, 2012:7). Kebijakan merupakan serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yang menjadi pokok dalam suatu kebijakan yaitu tujuan, sasaran dan kehendak. Carl J. Friedrich (M. Solly Lubis, 2007:7). Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pengertian Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. (menurut modul online). Penduduk didefinisikan sebagai jumlah total individual yang membentuk suatu kelompok tertentu, seperti jumlah orang yang mendiami suatu negara (Carter V.Good. Dictionary of Education). Pengertian pertumbuhan penduduk ialah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia

Definisi Konsepsional

Berdasarkan konsep-konsep yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi yaitu Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Samarinda dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui angka kelahiran sesuai dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) BAB 1 Pasal 12, 13 dan 14. Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda yakni sebuah penerapan kebijakan berupa pengendalian penduduk terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahun serta menekan angka kelahiran agar dapat tercipta keluarga sejahtera.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain”. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan who dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Sugiyono (2006:2) .

Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kualitatif sebagai suatu tradisi dalam

ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Moleong (2004:4)

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berilut:

1. Peran BKKBN dalam mengendalikan penduduk yang menjadi fokus penelitian adalah:
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk;
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pengendalian penduduk.
2. Faktor penghambat dalam meningkatkan Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Sebagai langkah pertama, peneliti memilih *key informan*, yaitu :

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Samarinda serta staff pendukung yang diambil dari bidang data di Badan Kependudukan dan Keluraga Berencana.
2. Serta sebagai informan adalah staff bidang data BKKBN Kota Samarinda dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah staff pegawai bidang-bidang yang berkaitan dengan pengendalian penduduk Kota Samarinda

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer
   Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti.
2. Data sekunder
   Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
   a. Dokumen-dokumen
   b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.
   c. Internet

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

2. Penelitian Lapangan
   a. Observasi,
   b. Wawancara,
   c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu :
   Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
   a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
   c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/ verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;

Dari beberapa pernyataan informan dikatakan bahwa BKKBN Kota sudah melaksanakan perencanaan program kegiatan setiap tahunnya. Adapun pengendalian penduduk yang dilakukan yakni seperti penyuluhan pada masyarakat terkait KB dan kesehatan reproduksi dengan memberikan edukasi serta pemahaman bahwa dalam setiap program yang direncanakan akan membantu pemerintah dalam menjaga keseimbangan angka kelahiran penduduk yang ada.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk

Berdasarkan Perwali Samarinda No. 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda, bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional, Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk dengan tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah guna melaksanakan kebijakan yang bersifat spesifik khususnya dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengendalian penduduk yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional.

Berdasarkan pernyataan dari informan dapat dikatakan bahwa BKKBN Kota Samarinda melakukan pelaksanaan terhadap program-program yang telah direncanakan dalam meningkatkan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan angka kelahiran penduduk dengan mengikuti berbagai program yang diadakan disetiap lingkungan masyarakat oleh BKKBN.

Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terdapat beberapa prinsip NSPK yang dapat dijabarkan, yaitu serangkaian aturan yang merupakan kebijakan nasional dapat berupa NSPK yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman untuk pemerintah daerah pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelenggaraan yang dimaksud meliputi urusan wajib dan pilihan, serta penetapan untuk urusan sisa dijelaskan pada pasal 25 ayat (1). Dalam hal ini penyelenggaraan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya satu tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini urusan wajib dan pilihan yang dimaksud menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pengendalian penduduk

Berdasarkan Perwali Samarinda No. 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda, bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk dengan tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah guna melaksanakan kebijakan yang bersifat spesifik khususnya dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengendalian penduduk yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional.

Jadi, setelah melakukan pelaksanaan dari semua program-program yang telah direncanakan lalu BKKBN langsung melakukan evaluasi setiap bulannya dan pembuatan laporan terkait program kegiatan. Evaluasi merupakan salah satu tahap yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu program di masa yang akan datang.

Faktor penghambat dalam meningkatkan Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Samarinda

Jadi berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat BKKBN Kota Samarinda dalam menjalankan perannya terkait pengendalian angka kelahiran penduduk yakni kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan adanya program kegiatan seperti penyuluhan kelapangan, pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan setiap program tertentu belum berjalan optimal, untuk masalah sarana pun masih kurang terlebih dengan masalah gedung sehingga membuat pekerjaan masih kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembahasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda telah melakukan perumusan kebijakan. Dalam hal ini BKKBN berperan untuk menetapkan strategi dan perumusan perencanaan kebijakan dengan melakukan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan program-program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk seperti program keluarga berencana, program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling, program pelayanan kontrasepsi, dan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang diharapkan mampu membantu untuk menekan angka pertumbuhan penduduk melalui angka kelahiran dengan cara Pembinaan Bidang Keluarga Berencana (KB), Pembinaan Bidang Pengendalian Penduduk, Pembinaan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pembinaan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Dari sinilah diperlukan peran BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Peran ialah sesuatu yang diperbuat, suatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Hasibuan (2005:3). Adapun pengertian lainnya peran atau biasa juga di sebut peranan (*role*) meneliti beberapa arti :

a. Aspek dinamis dan kedudukan.
b. Perangkat hak- hak dan kewajiban
c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
d. Bagian aktivitas yang di perankan oleh seseorang, Soekanto, (2010:24).

Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk

Menurut Perwali Samarinda No. 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda, bahwa Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional telah menjalankan pelaksanaan kebijakan dari berbagai program seperti program KB, Penyuluhan generasi remaja, pelayanan alat kontrasepsi yang diainggap dapat membantu dalam pengendalian angka kelahiran penduduk sehingga mampu meningkatkan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan angka kelahiran penduduk dengan mengikuti berbagai program yang diadakan disetiap lingkungan masyarakat oleh BKKBN dan melaksanakan penyuluhan untuk membina masyarakat dalam menyadari tentang pertumbuhan penduduk yang harus terkendali. Maka disini BKKBN berperan penting sebagai lembaga pelaksanaan untuk menjalakan tugas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010.

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyusunan norma, standar, dan kriteria ini adalah sama dengan artian dari penentuan SOP yaitu Standar Operasional Pelayanan, maka dari itu dalam setiap penyusunan rencana program yang ingin dilaksanakan setiap tahunya diperlukan standar terbaru agar mampu menentukan progam dan pelayanan seperti apa yang perlu diberikan kepada masyarakat. Namun BKKBN dalam hal ini masih berpedoman pada standar yang lama sehingga BKKBN pun masih melakukan program pelayanan yang sama dengan sebelumnya.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu terwujudnya Kesejahteraan melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Sasaran strategis Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut telah dapat dicapai dengan baik meskipun ada indikator kinerja yang belum maksimal dalam pencapaiannya. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat capaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil pencapaian Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda

No	Sasaran Strategi	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja			
			Baik (100-80)	Cukup (80-50)	Kurang dibawah 50	Rata-rata
1	Terwujudnya kesejahteraan melalui jaminan kesehatan dan pendidikan yang merata guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal	Persentase Akseptor KB setiap tahunnya	Baik			
		Persentase peserta KB Aktif	Baik			
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 setiap tahun	Baik			

Sumber : Rencana Kerja BKKBN Tahun 2018

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut ada yang pencapaiannya melebihi target dan ada yang kurang, hal ini dikarenakan Program Keluarga Berencana (KB) memerlukan pendekatan khusus karena menyangkut individu atau pribadi manusia. Oleh karena itu pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi perlu terus ditingkatkan agar program KB menjadi berhasil, baik dalam hal mewujudkan pengendalian penduduk maupun pencapaian sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas bagi pembangunan.

Faktor Penghambat Peran BKKBN dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Melalui Angka Kelahiran

Dalam Peran BKKBN mengendalikan Pertumbuhan Penduduk terrdapat faktor penghambat yang membuat angka kelahiran menjadi tidak terkendali diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan yang ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda.
2. Masih kurangnya pendanaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan yang ada.
3. Kurangnya SOP, Petunjuk Teknis (Juknis) dll sebagai pedoman pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda pada saat ingin melakukan kegiatan.
4. Kurangnya Penyuluh Lapangan (PKB) sehingga menyebabkan daya jangkau petugas lapangan tidak maksimal, seharusnya tiap kelurahan 1 PKB namun

kenyataannya PKB yang ada hanya 15 orang (PNS), 5 orang (CPNS) dan 10 orang (PTTB) yang terbagi di 59 Kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan

5. Banyaknya KUPTB yang beralih dari fungsional menjadi struktural

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Melalui Angka Kelahiran belum optimal, hal ini diketahui dari:
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk
      BKKBN melakukan perumusan kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dengan direncankannya beberapa program berkaitan dengan angka kelahiran yang dapat membantu dalam pengendalian pertumbuhan penduduk seperti program KB, program Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera, penyuluhan alat kontrasepsi dan penyuluhan generasi remaja.
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk
      BKKBN dalam melakukan pelaksanaan dari kebijakan yang telah direncanakan masih belum tercapai secara maksimal dikarenakan ada daerah belum masuk jangkauan BKKBN Kota Samarinda seperti di Kecamtan Sambutan Kelurahan Pulau Atas dan Makroman karena terkendala jalan akses memasuki desa.
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk
      Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dituntut untuk memiliki NSPK khusus BKKBN dengan berdasarkan NSPK pemerintah, namun NSPK dari pemerintah belum ada yang terbaru sehingga BKKBN masih berstandar pada NSPK lama sehingga setiap menentukan program penyuluhan masih berdasarkan standar yang lama, akibatnya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pencapaian setiap perencanaan program kerja BKKBN yang telah direncanakan.
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pengendalian penduduk
      Berdasarkan hasil pelaksanaan yang telah dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian setiap kegiatan pelaksanaan dapat dilihat mampu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan setiap program kegiatan serta mengeketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai untuk mencapai misi sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

2. Faktor Penghambat Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Melalui Angka Kelahiran yakni SDM yang masih kurang seperti pegawai untuk kegiatan penyuluhan lapangan sehingga membuat program penyuluhan KB, program Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera, penyuluhan alat kontrasepsi dan penyuluhan generasi remaja masih belum cukup baik serta fasilitas sarana tempat untuk BKKBN masih belum memiliki gedung sendiri.

Saran

Dari hasil penelitiian yang telah dilakukan, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan perencanaan untuk program pengendalian angka kelahiran penduduk seusai dengan keadaan masyarakat yang memiliki masalah berbeda-beda.
2. Dengan melakukan perekrutan CPNS khususnya PLKB/PKB berdasarkan kompentesinya sesuai kebutuhan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Samarinda.
3. Kegiatan pelaksanan terhadap kegiatan program harus jelas penjabaranterhadap hasil pencapaiannya.
4. Menempatkan tenaga PTT bidan desa/Kelurahan siaga yang bertugas di kelurahan sebagai tenaga PLKB di Kelurahan tersebut (dengan nota tugas dari BKD).
5. Harus selalu memiliki penyusunan standar, norma dan kriteriaUntuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terbaru yang disesuaikan dengan temuan fakta dilapanagan oleh PLKB/PKB sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Almasdi, Jusuf Suit. 2006. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Galia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Depdiknas. 2002. *Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning (CTL))*. Jakarta: Depdiknas.

Donnelly, Gibson. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.

Hasibuan, Malayu. S.P. 2008. *Organisasi Dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Manulang. M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.

Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis Edition 3*. California: SAGE Publication Inc.

Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakrya.

Narwoko, Dwi J. Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.

Nogi, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, achmad. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

Rivai, Veithzal. 2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sinambela, Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara